

Aksi Kamis jam 16.00-17.00 di depan Istana Presiden (26 April 2007, Kamis ke XVI1)

**Pernyataan Sikap
Keluarga Korban Pelanggaran HAM
REFORMASI TIDAK BERPIHAK PADA KORBAN**

Menyambut Peringatan 9 Tahun Tragedi Trisakti, (12 Mei 2007), Tragedi Mei 1998, kami kembali mendesak negara segera menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM. Hingga saat ini, kami menilai, Presiden SBY maupun DPR, tidak bersungguh-sungguh dalam penyelesaian hukum seluruh kasus pelanggaran HAM.

Perlu diingat bersama, Tragedi Trisakti 12 Mei 1998 yang menewaskan empat mahasiswa, yakni Elang Mulya Lesmana, Hafidhin Royan, Hendriawan Sie dan Heri Hertanto adalah pemicu lengsernya Soeharto dari Presiden, 21 Mei 1998. Yang kemudian, melapangkan jalan bagi demokrasi yang nikmati sekarang ini. Bahkan, tanpa pengorbanan para perintis perubahan, dapat dipastikan kita tetap dibekap junta militer, dipasung birokrasi dan digerus oligarki.

Sementara, fakta perjalanan penuntasan kasus menunjukkan Presiden SBY dan DPR hendak melupakan sejarah reformasi. Sikap itu ditunjukkan SBY melalui Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh, yang menolak menindaklanjuti Laporan Komnas HAM atas Kasus Trisakti, Semanggi I dan II, Tragedi Mei 1998. Juga, Badan Musyawarah DPR yang menegaskan kembali rekomendasi DPR periode 1999-2004, bahwa kasus TSS bukan pelanggaran HAM berat, sekaligus menolak usulan Komisi III DPR agar pimpinan DPR meminta Presiden SBY segera membentuk pengadilan HAM adhoc untuk kasus ini (13/03/07).

Fakta ini jelas merisaukan keluarga korban pelanggaran HAM. Untuk kasus Trisakti yang jelas-jelas turut mengantarkan jabatan yang dipangku Presiden dan anggota DPR saat ini saja mereka abai (*exclusion*) apalagi kasus-kasus lain, seperti: Kasus pelanggaran HAM 1965, Tanjung Priok, Talangsari/Lampung, Tragedi Mei 1998, Penculikan Aktivistis 1997-1998 hingga terakhir Pembunuhan Pejuang HAM Munir pada 2004 lalu.

Adapun perombakan kabinet terbatas yang baru saja dilakukan Presiden, belum menampakkan kesungguhan menjalankan amanat reformasi, terutama penegakan hukum dan HAM. Terbukti kentalnya politik kekuasaan dalam perombakan tersebut, yang ditandai tarik-menarik antar parpol untuk menduduki kursi menteri. Sehingga jelas bahwa sumber masalah adalah pengkhianatan komitmen reformasi dengan menelantarkan korban atas nama kepentingan kekuasaan.

Disadari atau tidak, pengkhianatan ini jelas tidak dapat ditolerir dan harus diinsyafkan. Kami terus mencatat pengabaian-pengabaian yang dilakukan Presiden dan DPR. Catatan ini akan kami sosialisasikan pada publik. Dan rakyat tidak tidur, tidak buta dan tidak tuli. Pada saatnya nanti, cepat atau lambat, hukuman pasti dijatuhkan.

Jakarta, 10 Mei 2007

Serikat Rakyat Miskin Kota, Korban dan Keluarga Korban Pelanggaran HAM Tragedi Trisakti Semanggi I dan II, Tragedi Mei 1998, Tragedi Penculikan Aktivistis 1997/1998, Tragedi Tanjung Priok, Tragedi Talangsari Lampung 1989, Tragedi 1965, Tragedi 27 Juli 1996, Pembunuhan Munir.